

BAB I

PENDAHULUAN

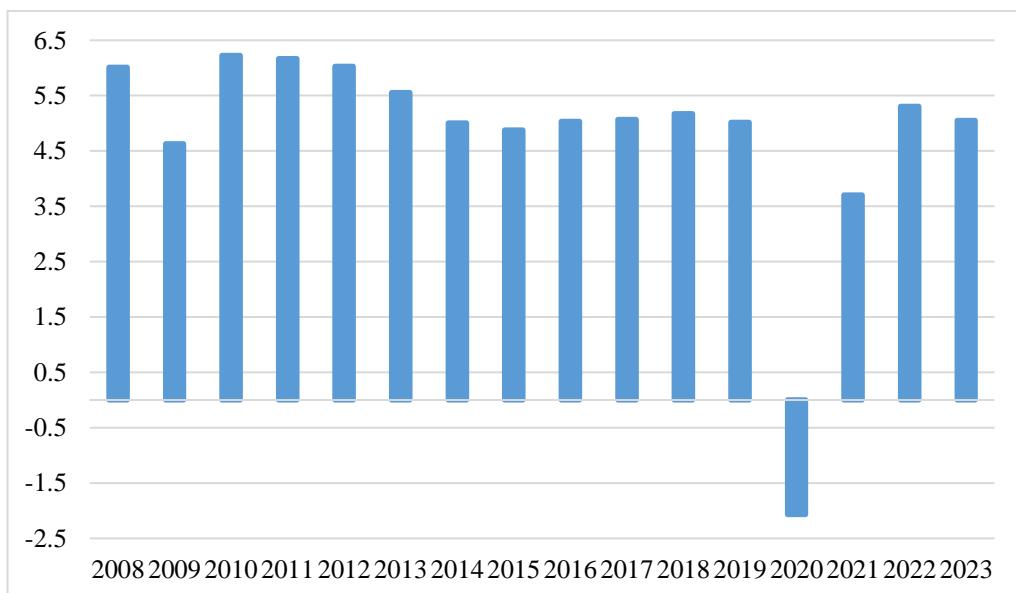
1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mengukur serta menilai kinerja pembangunan dalam suatu negara. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi yaitu, sebuah proses peningkatan kapasitas produksi barang maupun jasa dalam perekonomian sehingga mampu menambah penghasilan masyarakat pada periode tertentu, serta menjadi persyaratan penting untuk mencapai kesejahteraan hidup (Harahap et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan perkembangan kondisi ekonomi negara yang berlangsung secara terus-menerus dan bergerak menuju kondisi yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu negara diakatakan mengalami transformasi ketika terlihat adanya pengembangan yang nyata dalam aktivitas ekonomi, baik dari sisi produksi, pendapatan, maupun konsumsi masyarakat, sehingga di periode selanjutnya akan mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. (Dwi Yunianto, 2021).

Dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dengan rentang periode tertentu, bisa dengan melihat salah satu indikator atau alat ukur utama yaitu data Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan indikator paling umum untuk menilai kinerja ekonomi negara, baik dalam hal produksi maupun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mankiw, 2018). PDB menggambarkan jumlah keseluruhan nilai barang serta jasa yang diproduksi oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu negara dalam suatu periode, melalui nilai PDB dapat tergambar sejauh mana perekonomian nasional mampu mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendorong aktivitas produksi dan menciptakan nilai tambah (Putra & Soebagiyo, 2023). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan *output* rill dalam wilayah tertentu, sehingga sering digunakan sebagai tolak ukur utama untuk menilai kemampuan perekonomian wilayah tersebut (Dwi Yunianto, 2021).

Menurut *World Bank* dan IMF, negara berkembang seperti Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 6% hingga 7% per tahun untuk bisa keluar dari *middle income trap* dan kemudian menuju status negara maju.

Fenomena *middle income trap* menggabarkan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perlambatan atau *growth slowdown*. Situasi ini terlihat dari PDB yang cenderung stagnan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga negara tersebut sulit beranjak menuju kategori berpendapatan tinggi (Sujatmiko et al., 2021). RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024, yang memiliki target untuk pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4% hingga 6% per tahun sebagai prasyarat menuju Indonesia Emas 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).



Sumber: *World Bank*

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2008-2023)

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dalam periode 2008 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Menurut data dari *world bank* pada tahun 2008 sampai dengan 2012 ekonomi Indonesia tumbuh relatif kuat, berkisar antara 6,0% hingga 6,2% meskipun dunia tengah menghadapi krisis keuangan global (Aida et al., 2020). Namun, pada periode 2013 hingga 2016 laju pertumbuhan mengalami perlambatan ke kisaran 4,8% hingga 5,5% akibat melemahnya harga komoditas internasional serta kondisi eksternal yang kurang mendukung. Sebagai upaya menahan kenaikan pengangguran, pemerintah memberikan insentif kepada sektor usaha sehingga dapat mempertahankan tenaga kerjanya dan menghindari

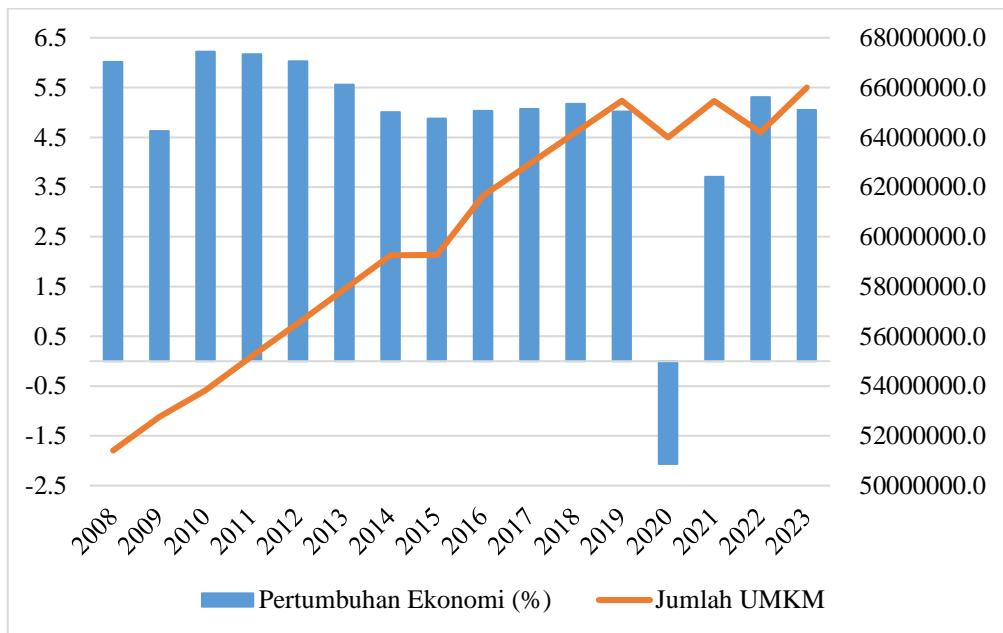
PHK (Dwi Nur Maulidia et al., 2023). Pada 2017 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi relatif stabil di angka 5,0% hingga 5,1% seiring meningkatnya investasi serta stabilnya permintaan domestik. Namun belum mampu menembus ambang 6% yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami stagnasi. Pada tahun 2020 menjadi titik balik, ketika Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan akibat perlambatan aktivitas ekonomi, PDB menurun tajam menjadi -2,06%. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Penurunan tingkat konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar PDB menyebabkan turunnya pendapatan riil nasional, sehingga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dan bahkan sempat mengalami kontraksi (Soleha, 2020).

Sejak 2021 hingga 2023, perekonomian Indonesia kembali menunjukkan pemulihan yang kuat setelah memburuk akibat perlambatan aktivitas ekonomi dimasa pandemi, terlihat pada grafik data pada tahun 2021 hingga 2020 yang mengalami kenaikan. Namun pada periode tersebut angka pertumbuhan ekonomi belum mampu kembali ke level pra-2013, dimana angka pertumbuhan ekonomi berada di titik 6%. Pemulihan ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan yang cukup tinggi, sekaligus peluang untuk tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan. Fondasi pemulihan tersebut tidak terlepas dari langkah strategis yang telah ditempuh pemerintah pada tahun 2020. Ketika terjadi pandemi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk program bantuan sosial dengan tujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, dukungan juga diberikan kepada dunia usaha melalui insentif fiskal dan program khusus yang menyasar korporasi maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Dwi Nur Maulidia et al., 2023).

Pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga menegaskan pentingnya keberadaan UMKM untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. UMKM dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (A. D. Putri, 2021). Perkembangan ekonomi nasional juga bergantung pada peran UMKM yang dapat menyangga perekonomian

Indonesia. Meskipun UMKM bukan merupakan satu sektor usaha tertentu, melainkan skala usaha yang mencangkup berbagai macam bidang, perannya tetap besar terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Kontribusi UMKM pada perekonomian nasional memiliki peran krusial melalui aktivitas produktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Sidin & Indiarti, 2020).

Pada tahun 2023 UMKM menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar diakibatkan dominasi dari kegiatan bisnis berskala mikro dan kecil berkisar 92% yang menyumbang sekitar 61% dari total PDB, setara dengan Rp9.580 triliun dan dapat menyerap 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Namun pada perekonomian Indonesia, penyumbang PDB terbesar selama beberapa tahun terakhir masih didukung oleh sektor industri pengolahan manufaktur. Beberapa tahun belakang ini, UMKM di Indonesia mengalami ekspansi yang cepat, memberikan andil yang makin signifikan terhadap Produk Doestik Bruto (PDB) (Perdana, 2024). Dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru, Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan komitmennya untuk mencetak 1 juta pelaku usaha hingga tahun 2024. Dengan langkah ini, pemerintah berharap rasio kewirausahaan nasional dapat mencapai 3,95%, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional periode 2021-2024 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Kebijakan pemerintah melalui RPJMN 2020-2024 menegaskan pentingnya memperkuat UMKM dan menekankan pentingnya transformasi UMKM untuk dapat memberikan andil besar terhadap perekonomian nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UMKM

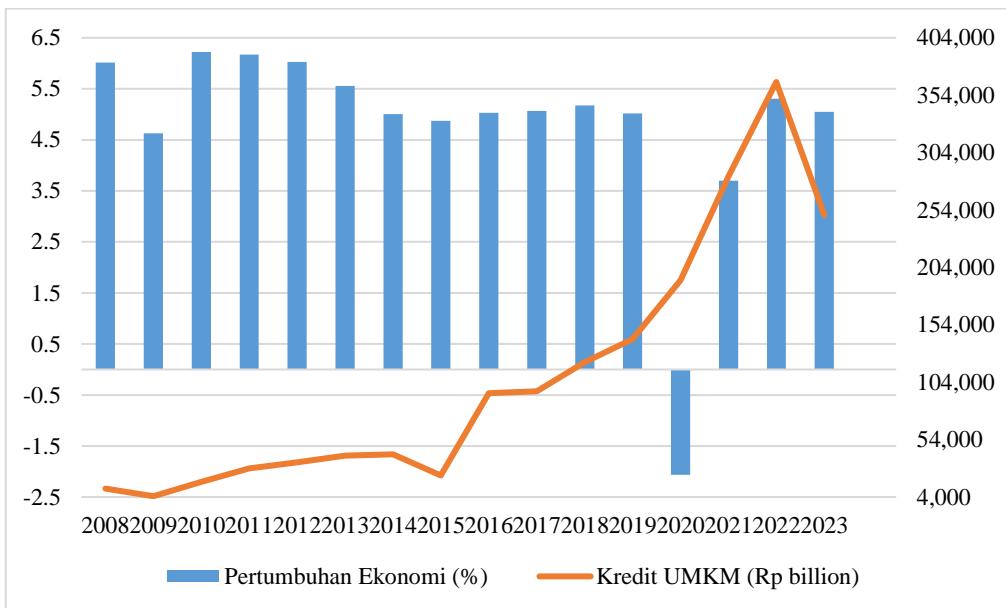
Gambar 2. Grafik Jumlah UMKM Indonesia (2008-2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik serta Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM meningkat dari sekitar 51,4 juta unit pada tahun 2008 menjadi 66 juta unit pada tahun 2023. Pada periode 2008 sampai 2009, jumlah UMKM meningkat pesat dari 51,4 juta menjadi sekitar 52,8 juta unit, mencerminkan ketangguhan kegiatan bisnis berskala mikro dan kecil ini dalam menghadapi krisis finansial global. Namun hal ini tidak sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, melainkan di tahun tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 6% ke 4,63%. Selanjutnya, periode 2011 hingga 2015 jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, tetapi pada pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga mencapai angka 4,88% ditahun 2015. Fenomena serupa juga terulang pada tahun 2019 dan 2023, ketika jumlah UMKM meningkat menjadi 65,47 juta hingga 66 juta, namun pada pertumbuhan ekonomi justru mengalami perlambatan dari 5,17% menjadi 5,02%. Pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi titik kritis akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Banyak UMKM terdampak pembatasan aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhannya melambat dan bahkan sempat stagnan. Meski begitu, kegiatan bisnis berskala mikro dan kecil ini masih bertahan dan berangsur pulih pada tahun 2022 hingga 2023, yang ditandai

dengan peningkatan jumlah UMKM hingga mencapai 66 juta unit (Dwi Nur Maulidia et al., 2023). Dari dinamika tersebut, terlihat bahwa perkembangan jumlah UMKM bersifat dinamis dan tidak lepas dari tantangan eksternal maupun internal (Zubedi et al., 2023).

Salah satu langkah penting dalam memperkuat daya saing UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Kredit UMKM, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah menjadi instrumen kebijakan utama pemerintah Indonesia dalam mendorong produktivitas dan kapasitas usaha mikro dan kecil (Bank Indonesia, 2018). Dalam RPJMN 2020-2024, penguatan pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB, salah satunya dengan akses pembiayaan. Upaya memperkuat akses pembiayaan UMKM melalui relaksasi kredit memiliki dasar hukum dalam PBI No. 14 Tahun 2012, yang mengatur kewajiban bank dalam menyalurkan pembiayaan ke kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini diperbarui melalui PBI No. 17 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa bank umum harus mengalokasikan minimal 20 persen dari total penyaluran kreditnya untuk UMKM, dengan tetap menjaga kualitas kredit yang diberikan (Nugraha & Susyana, 2021).

Tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditanggung debitur mengalami tren penurunan signifikan hingga mencapai 6 persen pada tahun 2020 sebagai langkah pemerintah dalam memberikan stimulus dan menjaga keberlangsungan usaha yang terdampak perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi. Kebijakan ini terbukti menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya tahan UMKM di tengah krisis. Namun, seiring dengan pemulihan dan meningkatnya aktivitas perekonomian nasional, skema suku bunga KUR kembali disesuaikan pada tahun 2023, dengan variasi mulai dari 3 persen untuk sektor-sektor prioritas tertentu hingga 6 sampai 9 persen per tahun untuk kategori pembiayaan lainnya (Farhana dan Rozali, 2023: 58).



Sumber : Asian Development Bank (ADB) Asia SME Monitor 2023

Gambar 3. Grafik Penyaluran Kredit UMKM (2008-2023)

Sebagai komponen fundamental perekonomian nasional, UMKM tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pentingnya kredit UMKM menjadi sangat penting dalam membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan daya jual nya di pasar internasional (Syahputra et al., 2023). Peningkatan pemberian kredit kepada UMKM yang terjadi setiap tahunnya menunjukkan komitmen dan dukungan pemerintah terhadap skala usaha ini. Pemberian kredit akan mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan produksi dan dalam skala yang lebih besar serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (Tarigan et al., 2022).

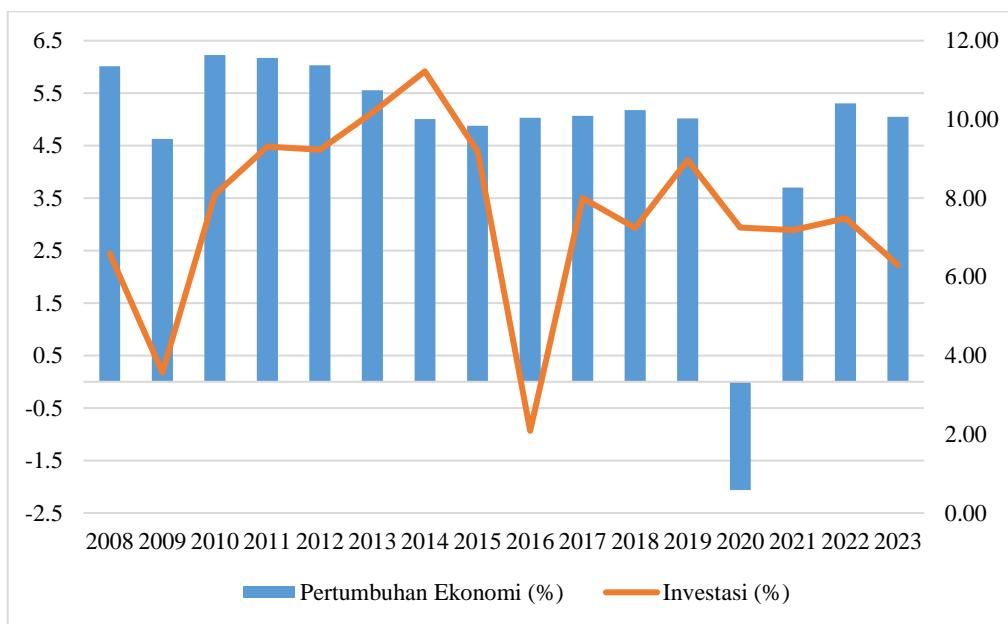
Perkembangan penyaluran kredit kepada UMKM di Indonesia pada tahun 2008 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara signifikan. Pada awal periode tahun 2008, jumlah kredit UMKM masih relatif kecil yaitu sekitar Rp11,4 miliar, hingga mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi Rp4,7 miliar. Namun demikian, sejak tahun 2010 hingga 2013 kredit UMKM kembali meningkat secara bertahap dengan kisaran Rp17,2 miliar hingga Rp40 miliar. Memasuki tahun 2015 hingga 2019, jumlah kredit UMKM mengalami lonjakan cukup pesat, khususnya pada tahun 2019 yang mencapai Rp141,6 miliar

(Aristanto et al., 2020). Tren peningkatan ini berlanjut pada masa perlambatan aktivitas ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi, meskipun terjadi perlambatan ekonomi secara umum, jumlah penyaluran kredit UMKM justru melonjak signifikan, yaitu Rp192,7 miliar pada 2020, Rp283,4 miliar pada 2021, dan puncaknya mencapai Rp365,5 miliar pada 2022. Namun, pada tahun 2023 terlihat adanya penurunan penyaluran kredit menjadi Rp249,8 miliar, yang dapat mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pasca pandemi (Ramadhani et al., 2022). Namun peningkatan kredit UMKM tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi cenderung stagnan di kisaran 4,8% hingga 6,2%. Pada periode 2010 sampai dengan 2013 serta 2016 hingga 2019, meskipun kredit meningkat tajam, pertumbuhan ekonomi tetap bergerak lambat. Peran kredit UMKM tidak hanya penting bagi keberlangsungan usaha skala kecil dan menengah, tetapi juga ikut serta memberikan kontribusi pada perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pernyataan di atas sejalan dengan pandangan bahwa investasi termasuk determinan penting yang menggerakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, kegiatan ekonomi bisa tumbuh karena adanya penambahan modal, pembangunan infrastruktur, serta terciptanya lapangan kerja. Oleh sebab itu, baik negara maju maupun negara berkembang terus berupaya meningkatkan arus investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun investasi asing (R. D. S. Putri & Siladjaja, 2021).

Investasi adalah penundaan penggunaan dana saat ini untuk dialokasikan pada suatu aset produktif dalam periode waktu tertentu, dengan harapan bisa memberikan keuntungan atau meningkatkan nilai di masa depan (Ras & Suroso, 2020). Investasi tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan stok modal, namun juga dapat berkontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas, serta percepatan perkembangan teknologi. Secara umum, investasi dapat terbagi menjadi 2, yang pertama investasi pemerintah, berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu investasi swasta, baik yang bersumber dari modal domestik maupun modal asing. Relevansinya dengan teori

pembangunan ekonomi dapat dijelaskan melalui teori Harrod-Domar, yang menekankan bahwa investasi memiliki peran ganda, yaitu menambah kapasitas produksi sekaligus menciptakan permintaan baru, sehingga menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Apriliansah & Suyatno, 2024).



Sumber: CEIC Data

Gambar 4. Grafik Investasi dari PDB Indonesia (2008-2023)

Berdasarkan data dari CEIC Data pada tahun 2008 hingga 2023 terlihat perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan fluktuasi. Pada awal periode, yaitu tahun 2008 sampai 2009 investasi mengalami penurunan akibat krisis global, namun pada tahun 2010 hingga 2014, investasi mengalami peningkatan dengan persentase tertinggi mencapai 11,22% pada tahun 2014, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan peningkatan yang proposional, dan stagnan di kisaran 5% hingga 6%. Namun, investasi di tahun 2016 terjadi penurunan tajam hingga 2,09%, yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi global maupun faktor domestik. Kemudian di tahun 2020 investasi tetap berada di angka 7,25% namun dimasa itu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tajam hingga -2,06%. Setelah itu, investasi kembali menunjukkan tren perbaikan meskipun tidak setinggi

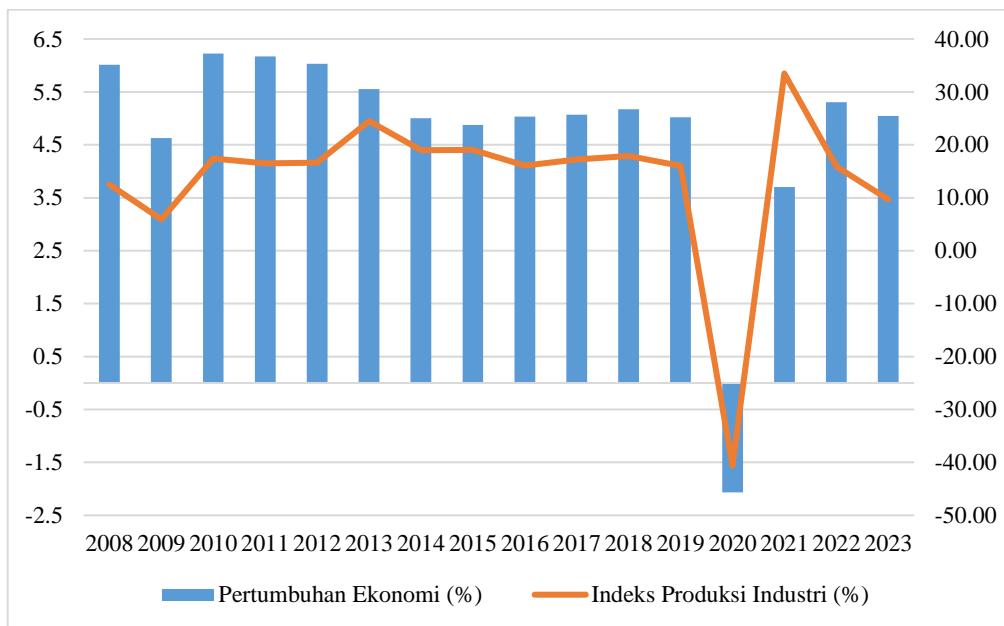
periode sebelumnya, dengan rata-rata berada di kisaran 7 sampai 9% hingga 2022. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh PDB atas harga berlaku relatif menunjukkan tren meningkat secara konsisten, meskipun laju pertumbuhannya tidak selalu sejalan dengan fluktuasi investasi (Salsabilla Shafa, 2024).

Pemerintah menempatkan sektor investasi sebagai prioritas dalam RPJMN 2020-2024 melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, investasi dijadikan faktor yang dapat mendorong transformasi ekonomi nasional, dengan target rasio investasi terhadap PDB mencapai 39% hingga 40% pada tahun 2024. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan UU No. 25 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa kegiatan investasi diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain jumlah pelaku usaha dan dukungan pembiayaan, faktor penting lain yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kapasitas produksi sektor industri. Dalam hal ini, Indeks Produksi Industri (IPI) digunakan sebagai indikator untuk mengukur perubahan volume *output* produksi di sektor industri. IPI memberikan gambaran menyeluruh tentang seberapa besar kapasitas produksi nasional mengalami ekspansi atau kontraksi dalam periode tertentu. Peningkatan IPI secara umum mencerminkan bahwa sektor industri domestik tengah mengalami pertumbuhan *output*, baik karena peningkatan permintaan, investasi baru, efisiensi produksi maupun penggunaan teknologi yang lebih baik (Ummah Ida L, 2024). Struktur sektor industri di Indonesia tidak hanya didominasi oleh industri besar, tetapi juga oleh industri mikro, kecil, dan menengah yang secara klasifikasi dapat termasuk dalam UMKM. Oleh karena itu, perubahan IPI tidak hanya merefleksikan kinerja industri skala besar, tetapi juga menggambarkan dinamika kapasitas produksi UMKM di sektor manufaktur.

Peningkatan produksi industri berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian karena mampu membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, serta memperluas pasar. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi nasional, tetapi juga mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi (Noer Diana, 2021). Pemerintah Indonesia menempatkan

penguatan sektor industri sebagai salah satu prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi industri.



Sumber: CEIC Data

Gambar 5. Grafik Indeks Produksi Industri (2008-2023)

Grafik Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia tahun 2008 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi selama periode tersebut. Secara umum, IPI mengalami pertumbuhan yang relatif stabil antara tahun 2008 hingga 2019, dengan kisaran pertumbuhan tahunan antara 11% hingga 24%. Namun, di tahun 2020 terjadi penurunan signifikan menjadi -0,61% akibat perlambatan aktivitas ekonomi yang melumpuhkan aktivitas industri dan diikuti dengan pertumbuhan PDB yang menurun hingga -2,06%. Meski demikian, sektor industri berhasil bangkit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan IPI sebesar 33,49%, menandakan adanya pemulihan pasca pandemi, tetapi pertumbuhan ekonomi hanya naik sebesar 3,70% dan masih dibawah target yang ditetapkan oleh RPJMN 2020-2024. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun tren IPI menurun, pertumbuhannya tetap positif, yaitu 15,90% pada 2022 dan 9,65% pada 2023 (Ariyani & Ummah, 2025).

Didasari pada latar belakang di atas, maka penulis memiliki keterkaitan untuk membuat penelitian dengan judul: **“Pengaruh Jumlah UMKM, Kredit**

UMKM, Investasi dan Indeks Produksi Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2008-2023)”. Penelitian ini memfokuskan pada variabel jumlah UMKM, kredit UMKM, investasi dan indeks produksi industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk melihat pengaruh signifikan antar variabel.

1.2. Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dalam meningkatkan *output* secara berkelanjutan dari waktu ke waktu serta menjadi salah satu parameter kesuksesan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Indonesia sebagai negara berkembang ditopang oleh berbagai sektor perekonomian, yang sebagian besar dijalankan dalam skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang secara konsisten menyumbang kontribusi besar terhadap PDB, dan juga turut menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat (Amrullah & Zumrotussaadah, 2021). Untuk memperkuat peran UMKM, pemerintah memberikan dukungan melalui program penyaluran kredit bagi UMKM, yaitu melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan *output* UMKM, peningkatan kapasitas usaha serta memperluas produksi yang dapat meningkatkan peran UMKM kedepannya serta dapat memperkuat kapasitas permodalan pelaku usaha guna mendukung terlaksananya kebijakan percepatan pengembangan sektor rill serta pemberdayaan UMKM (Viktoria Wulandari et al., 2024). Di samping itu, masuknya investasi baik modal publik maupun swasta, dapat memiliki peran krusial dalam memperlaju pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harrod Domar investasi bukan hanya dapat menambahkan kapasitas produksi melalui akumulasi modal, tetapi juga menciptakan permintaan agregat baru yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (Satria & Firmansyah, 2024). Kemudian Indeks Produksi Industri (IPI) juga merupakan faktor pengukur pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Indeks Produksi Industri (IPI) suatu negara mencerminkan adanya perbaikan kapasitas dan kinerja sektor industri dalam menghasilkan barang dan jasa. Kenaikan IPI yang signifikan dari tahun ke tahun dapat membuktikan bahwa sektor industri di Indonesia semakin produktif dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional (Ummah, I. L, 2024). Peningkatan produksi industri

berdampak pada peningkatan kegiatan perekonomian yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Noer Diana, 2021).

Namun fenomena empiris menunjukkan bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan perkembangan faktor yang mendukung, seperti jumlah UMKM, kredit UMKM, investasi, dan indeks produksi industri serta menunjukkan beberapa fenomena. Fenomena terjadi ketika jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, menunjukkan perkembangan signifikan, yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara (Hapsari et al., 2024). Kenyataannya tidak diikuti oleh kenaikan laju pertumbuhan ekonomi secara proposional, terlihat pada kontribusi UMKM yang belum mampu meningkatkan perekonomian secara optimal. Pemerintah juga mendukung peningkatan akses bagi pelaku usaha rakyat dengan menyediakan pembiayaan melalui skema peminjaman kredit dalam bentuk program KUR (Fauizah, 2020). Pemberian kredit ini juga terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, dana kredit yang diberikan terus bertambah dan lebih banyak menyasar para pelaku UMKM. Seharusnya hal ini dapat meningkatkan peran UMKM dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Pemberian kredit ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Akan tetapi, meskipun penyaluran kredit UMKM mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak selalu bergerak naik secara signifikan, bahkan sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran kredit dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat adanya potensi *mismatch* antara pembiayaan yang disalurkan dengan produktivitas usaha. Kemudian pada faktor investasi terlihat mengalami fluktuasi cukup tajam, dimana terjadi penurunan pada tahun 2015 dan 2020 beriringan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada periode pemulihan, pertumbuhan ekonomi tidak selalu meningkat seiring dengan kenaikan investasi. Seharusnya hal ini searah dengan teori Harrod-Domar, bahwa investasi berperan ganda dalam perekonomian, yaitu menambah kapasitas produksi melalui akumulasi modal serta menciptakan permintaan agregat baru (Qurayshilhady, 2024). Oleh karena itu, semakin tinggi

tingkat investasi yang ditanamkan dalam suatu perekonomian, seharusnya dapat meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Indeks produksi industri juga mengalami hal serupa, pada tahun 2020 indeks produksi industri mengalami kontraksi tajam yang sejalan dengan terpuruknya pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada periode setelahnya, ketika IPI menunjukkan pemulihan cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak serta merta meningkat secara proporsional. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah yang akan dianalisis adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023)?
2. Bagaimana pengaruh kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023)?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023)?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah di atas, sehingga tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023).
2. Untuk melihat pengaruh kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023).
3. Untuk melihat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023).
4. Untuk melihat pengaruh Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (2008-2023).

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan, manfaat tersebut dibagi menjadi aspek teoritis dan aspek praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian bisa berkontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur yang ada dengan menyajikan wawasan baru mengenai pengaruh jumlah UMKM, kredit UMKM, investasi, dan indeks produksi industri yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sangat diharapkan jika penelitian ini akan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan saat ini dan dapat digunakan di masa depan dengan menerapkan teori yang telah ada. Selain itu, harapannya penelitian ini akan berfungsi sebagai rujukan studi ilmiah dalam menentukan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberi wawasan pemikiran teoritis tentang variabel yang diteliti dan kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengimplementasian di bidang ilmu ekonomi.

b) Bagi pemerintah

Diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan acuan dalam proses penentuan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang tepat yang berkaitan dengan komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

c) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi dan bimbingan bagi yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah UMKM, kredit UMKM, investasi, dan indeks produksi industri yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber referensi untuk mendukung penelitian berikutnya

dan sebagai sumber informasi yang tentunya berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi, khususnya masalah pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber kepustakaan untuk memperkaya literatur.